

## BAB III

### ISLAM DAN NASIONALISME PERSPEKTIF ABDOLKARIM SOROUSH DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA

#### A. Islam Menurut Abdolkarim Soroush

Abdolkarim Soroush, khususnya, berpendapat bahwa negara Islam harus mempromosikan kemajuan ilmiah dan memberikan kebebasan kepada para sarjana untuk mengeksplorasi ide-ide baru tentang iman. Agama dapat dianalisis secara logis dengan cara yang sama seperti fenomena lainnya. Filsuf Muslim Iran Abdolkarim Soroush dapat dikategorikan sebagai tokoh anti kemapanan dari segi agama.

Karena pengetahuan agama semata-mata merupakan produk pemikiran manusia, ia tidak dapat dianggap sebagai realitas objektif. Lima tema muncul dari garis bawah gagasan Soroush Jahanbakhsh: (1) perbedaan agama dan pemikiran keagamaan; (2) agama itu ilahi, abadi dan suci; (3) pemahaman agama dan pengetahuan agama tidak suci; (4) pemahaman agama dipengaruhi oleh pengetahuan manusia; dan (5) pengetahuan agama dapat berubah dan terikat waktu.

Ada perbedaan pandangan masing-masing orang tentang agama, tetapi setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha memahaminya untuk mewujudkannya. Tentu saja, seseorang dengan kualitas ilmiah yang lebih tinggi akan memiliki pemahaman agama yang lebih baik. Oleh karena itu, filsafat agama dapat beragam dan bahkan menarik secara emosional. Karena semuanya welas asih, sudah pasti tidak ada yang religius.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bagir, Haidar. "Kata Pengantar: Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal" Dalam Abdolkarim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, Mahmoud Sadri Dan Ahmad Sadri(Eds.), Terj. Abdullah Ali. (Bandung: Mizan, 2002) H. 5.

Soroush menyatakan bahwa sementara pemahaman dan upaya untuk mewujudkan agama terserah kita, itu ada karena kehendak Tuhan. Ilmu agama yang seutuhnya manusiawi dan berlandaskan pada penguasaan ilmu manusia diciptakan pada masa ini. Perbedaan antara keduanya dan syarat-syarat perwujudannya merupakan bagian dari bidang "ilmu agama", dan sebagai akibatnya, keduanya sesuai dengan penafsiran khusus tentang agama. Ini penting bagi mereka yang mencari komponen konstan dan variabel dalam agama. Ketentuan tentang benda-benda tetap dan bergerak tidak akan diperoleh sebelum memahami agama, melainkan sesudahnya. Perlawanan terhadap keabsolutan pengetahuan dan pemahaman agama akan muncul dari pemahaman semacam itu, di satu sisi. Di sisi lain, hal ini mendukung berkembangnya pandangan pluralistik terhadap agama, di mana penguasaan atas keimanan setiap orang dapat dihargai.

Meski agama tidak berubah, menurut Soroush, sebagaimana dikutip Valla Vakili, pemahaman dan pengetahuan manusia tentang agama telah berubah. Salah satu dari banyak subbidang pemahaman manusia adalah agama. Itu tidak boleh dikacaukan dengan agama itu sendiri karena tidak didewakan oleh karakter ketuhanan agama. Ulama yang mencurahkan waktunya untuk mempelajari Al-Qur'an, Hadits, dan ajaran para Imam Syi'ah—jantung teks Islam yang tidak berubah—menghasilkan ilmu agama. Bergantung pada pendekatan mereka, para sarjana ini memberi teks berbagai interpretasi. Pendekatan mereka berkisar, misalnya, dari norma tata bahasa Arab hingga logika inferensial, dari filsafat Aristoteles hingga hermeneutika modern<sup>34</sup>.

Seiring waktu, pengetahuan agama berubah dan berkembang sebagai pemahaman yang lebih lengkap digantikan oleh pemahaman sebelumnya yang lebih terbatas. Semua interpretasi ini, bagaimanapun, dibatasi oleh periode sejarah di mana seorang sarjana agama tinggal dan oleh keadaan pengetahuan manusia secara umum dan dalam studi agama secara khusus pada waktu itu.

---

<sup>34</sup> Hashas, Mohammed. "Abdolkarim Soroush: The Neo-Mu'tazilite That Buries Classical Islamic Political Theology In Defence Of Religious Democracy And Pluralism", *Studia Islamica*, Vol. 109, No. 1, 2014.

Selain itu, tidak mungkin meneliti Alquran tanpa membuat ramalan di luar Alquran. Setiap pemahaman agama terikat waktu berkat perkiraan ini, yang ditentukan oleh pandangan dunia intelektual seorang sarjana (pemahaman tentang ilmu-ilmu manusia lainnya), karena pengetahuan agama dikembangkan melalui penerapan "pengetahuan hari ini" untuk mempelajari dasar-dasar agama.

Menurut Soroush, hanya agama yang tidak akan berubah, tetapi pemahaman, penemuan, dan pengetahuan agama akan berubah seiring waktu. Soroush menyembunyikan klaimnya atas penciptaan otoritas kebenaran antara memahami dan menemukan agama-agama yang ada karena sifat "perubahan" ini yang tidak dapat dihindari dengan memahami dan menemukan agama. Otoritas kebenaran absolut hanya milik agama; kebenaran mutlak tidak hadir dalam pengetahuan atau penemuan agama. Dimanapun kita berhadapan, menurut Soroush, adalah ilmu agama, yang melihat dan memahami agama tetapi bukan agama. Pedoman ini berlaku untuk semua bidang penelitian manusia.

Nacim Pak-Shiraz menegaskan bahwa Soroush melakukan pendekatan pembacaan Islam dari perspektif pluralistik. Dalam pidatonya pada November 2006 di London Centre for the Study of Nationalism, Soroush menekankan bahwa Islam tidak lebih dari kumpulan interpretasi yang beragam secara inheren. Mereka yang telah membangun reputasinya untuk pemahaman tertentu tentang Islam enggan menerima pandangan alternatif dan menganggapnya sebagai ajaran sesat. Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa ulama harus terlibat dalam aspek Islam karena keanekaragaman hayati tidak dapat dihindari. Seseorang dapat memodifikasi dan membekukan keberadaan satu radiasi karena tidak ada jalan yang "benar", tetapi tidak masuk akal untuk memaksakan ini sebagai iluminasi terbaik. Berbeda dengan "satu jalan yang benar", Soroush mengusulkan berbagai "jalan yang benar".

Penafsir agama sering merujuk pada tragedi penegasan kekuatan kebenaran sebagai "perbudakan agama". Soroush menanyakan beberapa persoalan yang sangat mendasar dalam konteks ini, seperti mengapa agama yang

seharusnya menjadi penguasa budaya dominan justru menjadi budaknya. Mengapa revivalis mencoba memurnikan dan menyensor agama? Mengapa konsep-konsep tertentu yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah ditunda sejak lahir untuk waktu yang tidak ditentukan? Mengapa ide-ide keagamaan perlu berkembang? Mengapa penjelasan tentang realitas diserahkan kepada generasi berikutnya? Mengapa putusan para ahli hukum Arab dan non-Arab melanggar prinsip budaya masing-masing? Dan sekali lagi, apa yang membedakan para pemikir Islam dengan para sufi? Last but not least, mengapa kita membutuhkan reformasi dan kebangkitan iman saat ini?

Soroush memberi tahu Muslim tentang kedudukannya sehubungan dengan ajaran Tuhan. Soroush menekankan bahwa umat Islam, tidak peduli siapa mereka, khususnya para ilmuwan dan pembaru agama, tidak memiliki otoritas untuk memastikan apa tujuan Tuhan untuk pelajaran mereka. Mereka adalah para pejuang yang hanya mencoba untuk memahami apa yang Tuhan coba sampaikan dalam Al-Qur'an sehingga, ketika mereka mencapai pemahaman tertentu, dia tidak memaksakannya kepada orang lain atau meminta mereka untuk mematuhi. Soroush mengungkapkan bahwa karena kita diusir dari surga, kita membutuhkan wahyu dalam hal ini. Setan membuat hidup kita sulit untuk dilihat, dan kita sering memiliki pemahaman yang tidak lengkap. Kami tidak pantas menggunakan kata-kata dan teladan Nabi. Sehubungan dengan alasan kami yang terbatas, kami mendeteksi kebenaran dan merespons dengan tepat. Kami adalah penerjemah agama yang dikenal dengan istilah *syârih*, bukan *syâri*. (perencana agama). Tidak sadar, kita sedang dirayu. Pertimbangkan dengan cermat orang-orang yang kata-katanya melampaui bidang pemahaman agama konvensional; suatu hari, kesombongan mereka mungkin menggoda mereka untuk mengenakan Jubah Kenabian.

Dalam hal ini Soroush menyatakan: *“Kita manusia sekarang diusir dari surga dan dirampas wahyu. Kami profan dan lesu. Hidup kita dirusak oleh Setan, dan pemahaman kita bisa salah. Berbicara dan bertindak seperti nabi tidak cocok untuk kita. Dengan alasan terbatas kami, kami mendapatkan aroma samar dari kebenaran dan bertindak sesuai dengan itu. Kami sharihan*

*(penafsir agama), bukan sahri'an (pemrakarsaagama). Kitalah yang terpikat, bukan yang sempurna. Membiarkan mereka yang menganggap kata-kata mereka di atas pemahaman agama belaka. gion berhati-hatilah: keangkuhan mereka mungkin akhirnya menggoda mereka untuk mengenakan mantel dari para nabi”.*

Karena pemilik paham keagamaan tidak mengembangkan kesadaran bahwa paham keagamaannya hanyalah salah satu dari paham keagamaan yang lain dan tidak sakral, maka muncul klaim otoritas kebenaran agama. Soroush menekankan bahwa agama, bukan pemahaman agama, harus menjadi sumber segala otoritas. Menemukan makna teks-teks agama merupakan tugas tunggal mufassir, atau pemikir, yang memiliki ilmu agama.

## **B. Awal kelahiran Nasionalisme**

Gerakan reformasi Protestan abad ke-15 ditandai dengan berdirinya negara-negara di Eropa. Salah satunya ketika otoritas menjadi “lectuti” di Jerman akibat pengaruh “kapitalisme” yang dipelopori oleh Jhann Gothenberg, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, hanya menyisakan otoritas keagamaan. Karya sastra menciptakan komunitas imajiner yang didukung oleh rasa takdir dan tanggung jawab bersama karena kesamaan bahasa dan pengalaman yang mereka peroleh.

Ketika Norwegia memasuki periode nasionalisme setelah penerbitan buku tata bahasa yang ditulis oleh IvaAsean dalam bahasa Ukraina pada tahun 1850, yang menandai berakhirnya bahasa Latin sebagai bahasa utama di Eropa abad pertengahan, nasionalisme kedua muncul melalui kekuatan bahasa sastra. Sebagai cikal bakal perkembangan nasionalisme dan semakin gencarnya kebangkitan nasionalisme di Eropa, nasionalisme Inggris pertama kali muncul pada abad ke-19.

Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, nasionalisme sangat dipengaruhi oleh budaya India, Hindu Jawa, dan nasionalisme India modern. Monarki yang dipengaruhi seperti Inggris dan Jerman, yang bersifat multinasional, membantu negara-negara kolonial lainnya menemukan identitas

nasional mereka masing-masing. Banyak yang dilukis dengan motif Jawa-Hindu oleh kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.<sup>35</sup>

### C. Bentuk Nasionalisme

1. Nasionalisme dapat berupa ideologi negara atau gerakan kerakyatan (non-negara) yang berlandaskan ideologi, opini, etnisitas, dan budaya. Sebagian besar teori nasionalisme menggabungkan beberapa atau semua kelompok ini karena biasanya saling terkait.
2. Nasionalisme sipil (civil nationalism) adalah bentuk nasionalisme di mana legitimasi politik negara berasal dari keterlibatan politik warganya, juga dikenal sebagai "kehendak rakyat" dan "perwakilan politik". Awalnya dirumuskan oleh Jean-Jacques Rousseau, gagasan ini telah menjadi subyek beberapa buku. Karya-karyanya yang terkenal antara lain novel *On The Social Contract*. (dalam bahasa Melayu "Tentang Kontrak Sosial").
3. Nasionalisme etnis adalah bentuk nasionalisme di mana budaya atau etnis asli suatu komunitas menjadi sumber legitimasi politik negara.
4. Nasionalisme romantis, juga dikenal sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas, adalah perkembangan nasionalisme etnis di mana, dalam semangat Romantisme, negara atau ras secara alami memberikan legitimasi politik pada negara. Keberadaan budaya etnis yang menjunjung cita-cita romantisme diperlukan untuk nasionalisme romantisme, dan narasi tradisinya dibangun di sekitar gagasan ini..
5. Nasionalisme budaya adalah suatu bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh otoritas politiknya dari budaya bersama, bukan dari "sifat turun-temurun" seperti ras atau warna kulit atau dari tradisi pemersatu negara. Orang Cina adalah ilustrasi terbaik dari populasi yang percaya bahwa dasar negara adalah budaya. Manchu dan ras minoritas lainnya masih dianggap sebagai warga negara Tiongkok, dengan aspek rasial dibalik.

---

<sup>35</sup> Adhayaksa Daut, *Islam Dan Nasionalisme*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2005), H.15.

Kesediaan dinasti Qu untuk menganut tradisi Tionghoa menjadi bukti validitas budaya Tionghoa.

6. Nasionalisme selalu menggabungkan nasionalisme etnis dengan bentuk nasionalisme sipil. Sentimen nasionalis yang kuat berarti akan diprioritaskan di atas kebebasan dan hak dasar. Nilai-nilai masyarakat demokratis bertentangan dan bertentangan dengan harga diri suatu bangsa. Kepemilikan sebuah "negara nasional" adalah pembenaran yang kuat, seolah-olah itu dengan sendirinya membangun dunia superior. Nazisme dan nasionalisme Turki kontemporer adalah contoh umum. Di mana nasionalisme kuat, secara sistematis akan ada klaim yang bersaing atas wilayah dan kesetiaan orang, seperti nasionalisme Turki dan penindasannya yang kejam terhadap nasionalisme Kurdi. dikombinasikan dengan nasionalisme Basque, Katalan, dan Korsika dalam bahasa Spanyol dan Prancis.
7. Nasionalisme agama adalah suatu bentuk nasionalisme di mana persamaan agama memberikan "legitimasi politik" kepada negara. Nasionalisme etnis dan nasionalisme agama sering dikacaukan. Misalnya, Katolikisme, kepercayaan umum Irlandia, adalah puncak dari nasionalisme; Agama Hindu, seperti yang dilakukan oleh pendukung partai BJP di India, merupakan puncak dari nasionalisme.<sup>36</sup>

Namun, bagi sebagian besar organisasi keagamaan nasionalis, ia hanya berfungsi sebagai simbol, bukan sebagai penggerak organisasi. Misalnya, mereka yang menganut agama Protestan memimpin nasionalisme Irlandia pada abad ke-18. Gerakan nasionalis Irlandia tidak bertujuan untuk mengangkat agama semata. Mereka merasa sulit mempertahankan kepercayaan yang dianut oleh Irlandia sebagai sebuah bangsa, khususnya budaya Irlandia. Akibatnya, nasionalisme sering dikaitkan dengan kemerdekaan.

Muslim menentang nasionalisme, rasisme, kesukuan, dan jenis penghinaan manusia lainnya yang tidak dimotivasi oleh keyakinan agama

---

<sup>36</sup> [Http://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Nasionalisme](http://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Nasionalisme) Daripada Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diunggah Pada Tanggal 22 Januari 2011, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 20223.

seseorang. Kedamaian dalam umat Islam dihancurkan oleh Islam. Penduduk Muslim di seluruh dunia berdoa dengan arah yang sama, berpuasa di bulan Ramadhan yang sama, dan menunaikan ibadah haji di Ka'bah yang sama tanpa memandang negara, warna kulit, atau keturunan. Setiap orang wajib mengenakan kain ihram putih yang sama, baik yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umrah. Istilah "ummah" secara konsisten salah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "bangsa" (tidak seperti gerakan "Nation of Islam", yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ditentang oleh mayoritas umat Islam). Al-Maududi merupakan salah satu tokoh yang terkait dengan pembaharuan Islam pada abad ke-20. Penyakit nasionalisme ateis,<sup>37</sup> penyebab runtuhnya gerakan Kholifah di Mesir.

#### **D. Islam dan Nasionalisme Menurut Abdolkarim Soroush**

Menurut Abdolkarim Soroush, fakta sejarah bahwa dalam budaya politik masyarakat liberal sekuler, pemerintah dan warganya bertindak seolah-olah tidak ada Tuhan, beroperasi dengan sepenuhnya mengabaikan keberadaan dan ketiadaan-Nya, tidak pernah mempertimbangkan berkah dan larangan-Nya. dalam kebijakan dan perilaku mereka, sebenarnya yang melatarbelakangi pentingnya memadukan agama dan nasionalisme. Di sisi lain, sebelumnya diyakini bahwa pemerintahan agama hanya berurusan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Mereka percaya bahwa kepuasan Tuhan datang secara alami sebagai produk sampingan, dan kepuasan manusia bergantung padanya. Pertanyaan tentang bagaimana menciptakan konteks pemerintahan Islam saat ini mengikuti dari sini. Mungkinkah menikmati kebebasan nasionalisme kontemporer tanpa harus mengabaikan kehadiran Tuhan?<sup>38</sup>.

iman dan akal dapat hidup berdampingan, terbukti dengan perkawinan nasionalisme dan iman. Jelaslah bahwa ikhtiar ini memiliki makna religius, bermanfaat, dan merupakan pertanda positif. Pemikiran seperti itu sama sekali

<sup>37</sup> Abu A., La Al-Maududi, *Kemerosotan Ummat Islam Dan Upembanagkitannya*, Bandung: Pustaka, 1984, Hlm, 39 (Tej) Waqi'ul Muslimin Sabil An-Nuhudh Bahim, Beirut: Dar Al-Fikr Alhadis , 1964.

<sup>38</sup> Soroush, Abdolkarim, *Reason, Freedom And Democracy In Islam : Essential Writings Of Abdol Karim Soroush*. (New York: Oxford University Press, 2000), H.122.

tidak tercemar oleh sikap anti-agama atau berpihak secara tidak adil pada salah satu pihak dalam upaya mengganti agama dengan keduniawian. Nasionalisme dan agama bekerja sama untuk menciptakan intelektual meta-religius yang setidaknya sebagian melampaui epistemologi agama. Misalnya, dalam pemerintahan otokratis, hanya pejabat yang berwenang mengambil keputusan; dalam pemerintahan yang demokratis, proses pengambilan keputusan didelegasikan kepada penduduk aktif; dan dalam pemerintahan agama, Tuhanlah yang memegang kendali. (agama).

Pada kenyataannya, administrasi berbeda dari ini. Akan tetapi, pemerintahan demokratik yang demokratis tidak dapat dibayangkan tanpa komunitas agama karena kelompok agama mendukung, mensponsori, sumber, dan mendorong kebijakan yang didasarkan pada agama. Pembeneran yang disebutkan di atas menawarkan landasan yang kuat dan formulasi yang akurat tentang masalah kesepakatan agama dan nasionalis, jika bukan jawaban yang sebenarnya. Argumen ini mencoba menempatkan seluruh bobot konstruksi konseptual nasionalisme pada fondasi intrareligius yang rapuh, seperti ajaran agama tentang musyawarah [syura], konsensus [ijma'], dan sumpah kesetiaan kepada penguasa, berbeda dengan tulisan-tulisan beberapa para pemikir Islam. bai'at]. Sebaliknya, perbincangan tentang tata kelola agama perlu dimulai dengan perdebatan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batas-batas kekuasaan. (semuanya adalah isu-isu ekstrareligius).

Landasan untuk menjalankan pemerintahan berbasis nasionalisme agama, menurut Abdolkarim Soroush, membutuhkan kebebasan—kebebasan internal maupun eksternal. Dengan melepaskan diri dari cengkeraman nafsu dan amarah, seseorang dapat mencapai kebebasan batin. Untuk mencapai kebebasan eksternal, seseorang harus dibebaskan dari tirani penguasa, lalim, penipuan, dan eksploitasi. Partisipasi dalam kontes kebebasan, sebuah proses publik yang didasarkan pada aturan dan regulasi, merupakan syarat untuk mencapai kebebasan eksternal. Kebebasan memerlukan peringatan terhadap tindakan kekacauan, kegilaan, dan anarki. Bertentangan dengan perbudakan dan

penghambaan manusia<sup>39</sup>. Melindungi kebebasan masyarakat dan hak individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa dengan demikian merupakan masalah kebebasan politik dasar bagi perkembangan nasionalisme modern.

Jaminan kebebasan rakyat yang digunakan untuk memilih pemimpin atau sistem politik formal yang bebas sekaligus digunakan untuk menggulingkannya jika terjadi penyimpangan dari pelaksanaan konstitusi menjadi substansi nasionalisme. Di mana pun di muka bumi ini, aktivitas nasionalisme menuntut syarat yang saling melengkapi antara rasa tanggung jawab, kerendahan hati, kesediaan menerima kehilangan secara terhormat, dan kemampuan menjaga kesadaran agar tidak membeku. Artinya, nasionalisme sejati mencakup semangat mengubah kesadaran manusia.<sup>40</sup>

Kebenaran dan evolusi pemikiran manusia benar-benar hilang jika kebebasan ditekan. Para pencari kebenaran harus sangat mencintai kebebasan, sedangkan mereka yang takut akan kebebasan adalah mereka yang menghargai gagasan rapuh mereka sendiri. Karena manusia adalah makhluk rasional, secara teori mereka harus bersimpati dengan kebebasan dan menuntutnya. Kebebasan terkait erat dengan akal dalam konteks ini. Karena akal adalah asal dan wadah kebenaran, kebebasan adalah hak asasi manusia yang fundamental.

#### **E. Islam dan Nasionalisme dalam Kehidupan Politik di Indonesia**

Bagi warga negara Indonesia, proses demokratisasi yang berlangsung sejak akhir 1990-an telah membuka babak baru dalam suasana yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Karena itu, banyak organisasi politik, termasuk partai dan gerakan Islam, melakukan penipuan diri sambil beroperasi secara rahasia. Mereka bahkan menerapkan filosofi organisasi mereka untuk mencakup bidang yang lebih luas. Beberapa ormas Islam menggeser tujuan dan sasarannya ke arah sekularisasi sambil mempertahankan identitas keislamannya dalam upaya menyesuaikan diri dengan lanskap politik yang bergeser.

---

<sup>39</sup> Soroush, Abdolkarim, *Reason, Freedom And Democracy In Islam : Essential Writings Of Abdol Karim Soroush*. (New York: Oxford University Press) H. 89.

<sup>40</sup> Ma'rif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009) H. 148-149.

Kecenderungan ini disebut sebagai post-Islamisme oleh para pengamat politik.<sup>41</sup>

Kebanyakan orang Indonesia menempatkan penekanan kuat pada Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam lanskap politik pilihan warga negara Indonesia juga merupakan kekuatan politik yang cukup besar. Misalnya, banyak kelompok Islam telah lama menginginkan agar Islam memainkan peran yang lebih besar dan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mempromosikan dan mempublikasikan gagasan penerapan hukum Islam secara luas, sementara yang lain bahkan menganjurkan pendirian negara Islam. Para Islamis ini dengan demikian terus menjadi ancaman yang signifikan terhadap kekuasaan dan otoritas negara Indonesia. Namun, demokratisasi Indonesia yang terjadi sejak penggulingan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 telah menyebabkan pergeseran paradigma di antara berbagai organisasi Islam, termasuk partai-partai Islam, ke arah pandangan yang lebih toleran terhadap isu-isu terkait demokrasi.<sup>42</sup>

Islamisme dapat disamakan dengan ideologi lain yang ada di seluruh dunia. Islamisme, menurut Asef Bayat, terdiri dari ideologi dan gerakan yang bertujuan untuk menciptakan semacam tatanan Islam, seperti negara Islam, hukum syariah, atau prinsip-prinsip moral yang diambil dari ajaran Islam. Tiga pendukung doktrin Islamisme yang paling menonjol adalah Abu'l Ala Mawdudi dari Pakistan, Hasan Al-Banna dari Mesir, dan Sayyid Qutb. Para pendukung Islamisme juga menjunjung tinggi Ayatollah Khomeini sebagai dalang Revolusi Iran pada tahun 1979. Islamisme juga mengalami perubahan; di beberapa daerah, itu berkembang menjadi apa yang disebut Bayat dan yang lainnya sebagai Post-Islamisme.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Azlan Tajuddin, "Development, Democracy, And Post-Islamism In Indonesia", *International Journal Of Social Science Studie*, Vol. 4, No. 11, November 2016. I

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup> Hans Abdiel Harmakaputra, "Islamism And Post-Islamism: 'Non-Muslim' In Socio-Political Discourses Of Pakistan, The United States, And Indonesia", *Al-Jāmi'Ah: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 53, No. 1, 2015, 179-204.

Dalam bidang sosial, politik, dan intelektual, Bayat menegaskan bahwa post-Islamisme adalah kondisi dan proyek yang mengkonseptualisasikan dan mengembangkan strategi dan modalitas untuk melampaui Islam. Ini dilakukan dengan mengkonseptualisasikan dan menyusun strategi pemikiran dan modalitas transendensi Islam. Ia berkembang sebagai alternatif terhadap Islamisme, sebuah doktrin yang lebih kaku. Karena post-Islamisme bertujuan untuk memadukan Islam dengan kebebasan dan modernitas, hal itu dapat digambarkan sebagai strategi hibrida. Perpaduan antara agama dan hak, iman dan kebebasan, serta Islam dan demokrasi adalah apa yang ingin dicapai pasca-Islamisme.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Berdasarkan kerangka demokrasi ini, sistem ketatanegaraan nonreligius dapat hidup berdampingan dan berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai agama di ranah publik sebagai ciri yang sangat kasat mata. Setiap orang dapat melihat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang eksklusif atau kaku dengan melihat interaksi antara Islam dan demokrasi yang terjadi dalam struktur negara Indonesia. Di sisi lain, demokrasi adalah struktur yang dirancang dengan Islam sebagai salah satu komponennya. Namun, selalu ada pasang surut hubungan antara Islam dan negara sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini tergantung pada proses politik yang muncul di Indonesia pada titik waktu tertentu.

Politik Islam, bagaimanapun, juga telah berubah haluan untuk mengakomodasi keadaan ini seiring dengan ekspansi dunia Islam dan upaya untuk mendemokratisasi negara Indonesia. Organisasi Islam merangkul modernitas dan cita-cita demokrasi tanpa mengorbankan karakter Islam mereka.